

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSRENBANG DESA**
(Studi di Desa Permanu Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik**



OLEH:

FATIMA DIHUNG

2018210223

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

RINGKASAN

Peran pemerintah dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan lebih khususnya pada musrenbang desa adalah perihal yang krusial serta tidak bisa dipisahkan. Peranan dari pejabat desa untuk upaya peningkatan pembangunan desa dengan pondasi yang telah dirumuskan guna menjalankan perencanaan pembangunan desa yang diharapkan oleh masyarakat. Musyawarah dalam rangka rencana pembangunan desa merupakan forum yang diselenggarakan setiap tahun dimana dilakukan dengan partisipatif dari seluruh yang berkepentingan dalam desa dengan tujuan kesepakatan rencana kegiatan untuk setahun dan 5 tahun pembangunan desa. Musrenbang adalah model perencanaan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada peran serta/partisipasi masyarakat, Suatu perencanaan pembangunan membutuhkan keterlibatan masyarakat perseorangan ataupun secara kelompok baik dalam perencanaan, pelaksana bahkan pada tahap evaluasi. Untuk menunjang partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan tentunya diperlukan peranan pemerintah untuk mengarahkan maupun melayani masyarakat dalam penyampaian aspirasinya. Riset yang dilakukan ini memiliki tujuan menganalisa peranan pemerintah untuk peningkatan partisipasi masyarakat di musyawarah perencanaan pembangunan desa dan melakukan analisa faktor pendukung serta penghambat dari peningkatan partisipasi masyarakat desa di musrenbang desa permanu Kabupaten Malang. Jenis pendekatan yang dipakai pada penelitian yang dilakukan ini yaitu kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, melakukan pengamatan pada lokasi penelitian serta dokumentasi. Instrumen yang dipakai merupakan peneliti sendiri.

Metode analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data, perumusan kesimpulan. Hasil temuan dalam penelitian di desa permanu diketahui bahwa peranan dari pemerintah untuk peningkatan partisipasi masyarakat baik pada perencanaan, pembuatan keputusan bahkan sampai pada tahap evaluasi pemerintah selalu melibatkan masyarakat pada setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa permanu. Partisipasi masyarakat desa permanu juga dalam hal mendukung program dari pemerintah sudah cukup baik meskipun prestasi keterlibatan masyarakat tidak sepenuhnya terlibat. Faktor pendukung dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran kegiatan serta melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui komunikasi. Faktor penghambatnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan sumber daya manusia yang masih minim.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Musrenbang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yaitu sebuah tahapan yang direncanakan untuk merubah dengan mengarah pada keterbaruan secara membaik dari masa lalu. Pembangunan yang direncanakan dalam skala nasional kemudian didelegasikan secara desentralisasi kepada masing-masing daerah hingga desa dikarenakan mayoritas masyarakat di Indonesia hidup dalam pedesaan. Maka rencana dalam membangun desa tidak terlepas dari program yang telah direncanakan pada skala pembangunan nasional. Pembangunan desa yaitu ketuhanan yang lengkap pada rancangan dalam membangun negara yang fundamental. Pembangunan adalah kegiatan yang berkelanjutan dari dulu hingga sekarang yang diterapkan oleh masyarakat adalah kerja sama antar masyarakat untuk mendapatkan suatu perubahan yang diharapkan. (Gunawan Sumodinigrat, dkk, 2005:1)

Pembangunan membutuhkan keterlibatan peran serta individu yang aktif sejak pertama kali dilakukan serta nyata di semua kalangan yang memiliki kepentingan (stakeholder) pada pembuatan perencanaan program. Pembangunan daerah yang direncanakan dari skala provinsi hingga desa perlu adanya kehadiran masyarakat di dalamnya dimana masyarakat berperan sebagai penyalur inspirasi dan pengawas dalam berjalannya proses perencanaan hingga terlaksananya program desa. Hal tersebut sesuai dengan slogan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pada pembangunan itu sendiri tentunya memiliki wadah untuk mempertemukan dan menampung berbagai aspirasi dari

berbagai pihak kepentingan baik dari pemerintah sendiri maupun dari pihak non pemerintahan yang memiliki impian dan cita-cita bersama untuk membangun daerah lebih baik, berkembang, ataupun berkelanjutan menuju perbaikan. Wadah itu sendiri sering kita sebut sebagai ‘Musrenbang’ sudah terkenal pada diselenggarakannya rencana dalam membangun serta menganggarkan program desa. Dalam (Moch Solekhan, 2014: 61) Musrenbang merupakan forum yang diisi para pemegang kepentingan yang memiliki tujuan dalam perencanaan membangun daerah untuk kontribusi sebagai pembangunan nasional yang nyata.

MUSRENBANG merupakan forum yang diselenggarakan setiap tahunnya dengan dihadiri oleh pemegang kepentingan di desa guna perencanaan program desa 1 hingga 5 tahun kedepan. Musrenbang diselenggarakan untuk menyelaraskan atau menyesuaikan berbagai keinginan atau harapan dari masyarakat dimana didapatkan pada musrenbang di desa yang kemudian akan diusulkan di tingkat kecamatan. Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang berfungsi sebagai proses penawaran/negosiasi yang mengarah pada perbaikan dan keselarasan perbedaan pada kepentingan non pemerintah serta pemerintah yang sejalan untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai hal yang paling utama dalam kebijakan pembangunan desa. Musrenbang adalah model perencanaan pembangunan yang lebih menitikberatkan pada peran serta/partisipasi masyarakat, namun dalam kenyataan partisipasi masyarakat pada Musrenbang masih dipertemukan problem yang dapat menghambat atau minimnya partisipasi masyarakat hal ini dikarenakan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat serta Musrenbangdes cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. (Rianingsih Djohani, 2018: 3-5)

Untuk memberikan kesempatan penuh kepada masyarakat agar ikut terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan baik dari tahap agenda/perencanaan, pelaksanaan/penerapan, pemantauan/pengamatan, evaluasi/penilaian dan pelaporan hasil lebih khususnya pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa tentunya yang paling utama dan berperan penting dalam mencapai kesuksesan dan keberhasilan tidak terhindar dari peranan

pemerintah desa itu sendiri, karena pemerintah dapat dikatakan sebagai instrumen/alat penggerak utama.

Peran merupakan status yang dimiliki pada suatu aspek yang dinamis. Peran yang merupakan sebagai strategi yang digunakan oleh pemerintahan desa untuk terlaksananya musrenbang tingkat desa. Peranan pemerintah dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan lebih khususnya pada musrenbang desa adalah hal yang krusial serta tidak bisa dipisahkan, karena dalam hal ini pemerintah desa dituntut untuk menggerakkan seluruh kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai tumpuan keberhasilan karena pemerintah sebagai instrumen atau alat penggerak yang paling utama dan penting karena pemerintah dianggap sebagai orang yang mampu dan selalu siap bersedia dalam upaya menunjang keberhasilan dari setiap program yang ada.

Pemerintah memiliki tujuan yang mulia dengan adanya keteraturannya dalam menciptakan ketertiban serta ketentraman di lingkungan masyarakat. Ketentraman merupakan kenyamanan yang dirasakan oleh seseorang dikarenakan kebutuhan yang telah terpenuhi baik kebutuhan primer hingga tersier dan terdapat peluang dalam aktualisasi diri mereka. Peranan pemerintah yang sebagai pemegang dan sebagai pengendalian roda pemerintah yang memiliki tujuan yang mulia yang berdampak pada kehidupan masyarakat-nya dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam memberikan bimbingan, motivasi, pengarahan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pemerintahan lebih khususnya pada Musrenbang Desa yang membutuhkan peran serta yang aktif dari masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal dari peneliti mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang desa peserta musrenbang yang telah di undang tidak begitu antusias dalam menghadiri kegiatan tersebut dikarenakan adanya faktor keterbatasan waktu masyarakat yang memilih untuk meluangkan waktu pada pekerjaan mereka hal ini dibuktikan karena sebagian masyarakat di desa permanu bekerja sebagai petani. Meskipun nantinya hadir pada saat

kegiatan akan tetapi kehadirannya juga tidak menjamin dapat menanggapi atau menyampaikan informasi terkait kegiatan tersebut. Minimnya partisipasi masyarakat pada musyawarah perencanaan pembangunan di desa permanu juga diketahui dikarenakan minimnya SDM yang dimiliki oleh masyarakat desa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa Dengan adanya, BPD dan RT masyarakat beranggapan aspirasi yang akan disampaikan oleh mereka sudah terwakili, sehingga masyarakat memutuskan untuk tidak hadir. Pemerintah desa adalah salah satu instansi yang paling rendah pada wilayah Indonesia. Pemerintah desa memiliki peranan krusial dalam kesatuan masyarakat di desa dan merupakan pelayanan paling depan untuk memberikan layanan bagi rakyat.

Dengan berlandaskan latar belakang yang dideskripsikan sehingga peneliti terdorong untuk meneliti tentang “ **Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musrenbang Desa Di Desa Permanu Kecamatan pakisaji Kabupaten Malang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang timbul berdasarkan latar belakang penelitian ini antara lain yaitu:

1. Bagaimana peranan pemerintah pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang desa). di Permanu Kabupaten Malang?
2. Apa Faktor yang dapat mendukung serta menghambat Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pada Desa Permanu Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui peranan pemerintah desa pada peningkatan partisipasi masyarakat di Musrenbang.

2. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung serta menghambat Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pada Desa Permanu Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Riset ini memiliki harapan sebagai kontribusi yang bermanfaat pada teori dan ilmu praktis.

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai peranan pemerintah pada peningkatan partisipasi masyarakat di musrenbang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, temuan yang didapat pada riset ini diharap menciptakan saran yang membangun untuk lembaga pemerintahan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada musyawarah perencanaan pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bihamding, Hariawan, 2017. *Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa*. CV Budi Utama: Yogyakarta.
- Djohani, Rianingsih, 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Desa*. Studio Driya Media Oc- FPPM: Bandung.
- Labolo, Muhamad, 2014. *Memahami Ilmu Pemerintah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mardikanto, Totok. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Roesmidi, dan Risyanti, Riza. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Alqaprint Jatinangor: Sumendang.
- Rosidin, Hutang, 2019. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. CV. Pustaka Setia: Bandung.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press: Malang Jawa Timur.
- Soetomo, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sumodinigrat, Gunawan, dan Wulandari, Ari. 2016. *Membangun Indonesia dari Desa*. Media Presindo: Yogyakarta.
- Sumpeno, Wahyudi, 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Rainforcement Action and Development/ READ: Banda Aceh.

B. Jurnal dan skripsi

- Ahmad Mustanir, Kamaruddin Sellang, dkk, 2018. Peranan Aparatur Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Clean Government*. Volume 2, No. 1
- Husnul Imtihan, Dr. Wahyunadi, dkk. 2017. *Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Volume 11, No. 1.
<http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>. Diakses 25 juni 2022
- Sapri, Ahmad Mustanis, Dkk. 2019. *peran camat dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan*, Vol 5 (Nomor 2), 33-48
Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2127>. Diakses 25 juni 2022
- Riski Akbar Prasajo. 2015. *Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Website: <http://eprints..umsida.ac.id/1056>.

C. Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa